

PAJAK PEMBANGUNAN I DAN UPAYA PENINGKATANNYA DALAM RANGKA MENUNJANG PENERIMAAN DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA MALANG

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan

guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Jurusan Ilmu Ekonomi dan

Studi Pembangunan

**M I L I K
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
S U R A B A Y A**

C. 389/92

Gun
Op



OLEH :

MARCELL LAURENTIUS LAKSONO GUNAWAN

No. Pokok : 048712600

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

1992

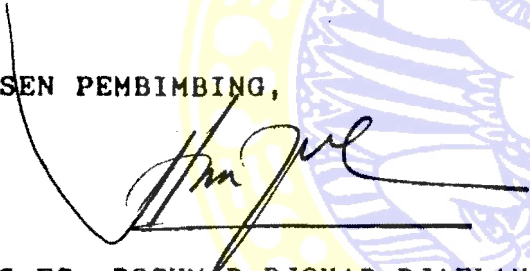
SKRIPSI
PAJAK PEMBANGUNAN I DAN UPAYA PENINGKATANNYA
DALAM RANGKA MENUNJANG PENERIMAAN DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA MALANG

DIAJUKAN OLEH :
MARCELL LAURENTIUS LAKSONO GUNAWAN

No. Pokok : 048712600

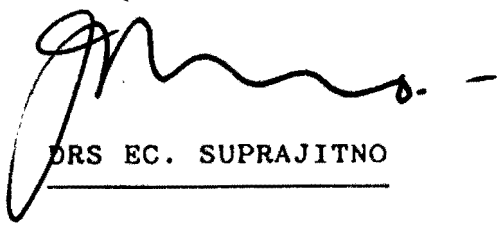
TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH :

DOSEN PEMBIMBING,


DRS EC. ROCHMAD DJOHAR DJAELANI

TANGGAL 10-11-92

KETUA JURUSAN,


DRS EC. SUPRAJITNO

TANGGAL 16 Des. 1992

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan mengenai pajak pembangunan I di kotamadya Malang pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran-saran yang dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan pajak pembangunan I di kotamadya Malang.

4.1. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan mengenai pajak pembangunan I di kotamadya Malang adalah :

1. Kesadaran wajib pajak yang rendah dapat dikatakan sebagai kendala dalam memungut pajak pembangunan I. Tetapi kendala ini dapat diatasi dengan melakukan penyempurnaan pada sistem pelaksanaan pemungutan yang ada sehingga kemungkinan wajib pajak untuk curang dapat ditekan sekecil mungkin.
2. Penerimaan pajak pembangunan I dapat ditingkatkan dengan dua cara, yaitu :
 - memperbaiki teknis pelaksanaan pemungutannya.
 - meningkatkan kuantitas dan kualitas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, terutama jumlah kamar hotel. Karena faktor ini paling berperan dalam meningkatkan pajak pembangunan I.

4.2. SARAN

Saran-saran yang dapat disumbangkan oleh penulis agar penerimaan pajak pembangunan I dapat meningkat adalah :

1. Pihak dinas pendapatan daerah sebaiknya mengadakan penyuluhan terhadap wajib pajak sebagai upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.
2. Pengadaan penyuluhan terhadap masyarakat agar turut serta dalam pengawasan pemungutan pajak pembangunan I dengan cara meminta bon/nota pembayaran yang telah diperforasi oleh pemerintah daerah kepada wajib pajak.
3. Perlu diadakan penyempurnaan sistem pemungutan pajak pembangunan I dan atau pengawasannya, antara lain dengan cara pemberian sanksi yang berat bagi yang melanggarnya.
4. Peningkatan kualitas kota Malang baik sebagai kota pendidikan, kota pariwisata maupun kota industri, antara lain dengan menjaga kebersihan kota, meningkatkan pelayanan dan kemudahan untuk mencapai tujuan wisata dari hotel-hotel di kotamadya Malang.